

“Banking” Weekly Hotlist (31 Juli – 4 Agustus 2017)

KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Rendah, BI Beri Sinyal Longgarkan Kebijakan moneter

Bank Indonesia (BI) memberikan sinyalemen untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Hal ini sejalan dengan inflasi yang memasuki tren rendah dan terjaga di sepanjang tahun ini. Pelonggaran kebijakan moneter diyakini dapat menopang ekonomi secara berkelanjutan. Sinyal BI melakukan pelonggaran kebijakan moneter tersebut sejalan dengan upaya BI dalam merespons dan membantu terjaganya investasi dan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sejauh ini BI memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tren perbaikan. Namun demikian, kata dia, BI tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2017 berada pada kisaran 5-5,4 persen. Sedangkan untuk laju inflasi Juli 2017 yang sebesar 0,22 persen (month-to-month) merupakan inflasi pasca Lebaran yang terendah sejak tiga tahun terakhir. Selain itu, kondisi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan juga masih berada pada taraf yang baik atau masih berada dibawah, serta defisit nilai transaksi berjalan maupun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga terkendali.

(Sumber: Infobank, 31 Juli 2017)

PENGAWASAN PERBANKAN

OJK Kurang Mengawasi Multifinance

Kalangan perbankan yang memiliki portofolio kredit di perusahaan pembiayaan meminta kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru untuk memberikan pengawasan yang lebih baik kepada industri multifinance. Mencuatnya kasus Arjuna Finance dan Bima Finance adalah contoh kurang tegasnya OJK dalam mengawasi perusahaan-perusahaan multifinance selama ini.

Berdasarkan sumber infobank, kisruh jual beli saham Arjuna Finance yang sudah terjadi sejak delapan tahun lalu seharusnya tidak dibiarkan begitu lama oleh OJK. Konflik terjadi antara pemilik Arjuna Finance dengan investor baru yang tak menepati janji dalam memasukkan modal sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan perusahaan. Kenakalan-kenakalan operasional tak terelakkan dan membuat kualitas pembiayaan Arjuna Finance kian memburuk.

Lolosnya investor yang justru membuat perusahaan pembiayaan menuai masalah seharusnya tidak terjadi jika OJK melakukan fit and proper test dengan baik untuk menyeleksi masuknya investor baru apakah layak atau pernah melakukan tindakan tak terpuji. OJK juga kurang tegas kepada pemilik lama yang masih mengoperasikan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya.

OJK juga seperti tidak memikirkan kepentingan bank-bank sebagai kreditor dengan memutuskan memberi sanksi pembatasan kegiatan usaha Arjuna Finance pada April lalu yang membuat bank-bank merasa tidak nyaman sehingga ketakutan pun merembet ke Bima Finance. Perusahaan pembiayaan yang pada 2016 masih mencatat pertumbuhan pembiayaan 33 persen ini pun limbung karena bank-bank menghentikan kucuran kreditnya.

(Sumber: Infobank, 31 Juli 2017)

Ketua OJK Pangkas Jumlah Deputy Komisioner Jadi 16

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah perubahan organisasi sebagai kelanjutan program efisiensi dan efektivitas yang dicanangkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, dengan melakukan perampingan organisasi dan pengurangan fasilitas Anggota Dewan Komisioner OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melantik beberapa pejabat baru dalam struktur organisasi baru OJK dengan menggabungkan sejumlah satuan kerja organisasi setingkat Deputy Komisioner. Yang sebelumnya, terdapat 18 satuan kerja organisasi setingkat Deputy Komisioner, dengan perampingan ini jumlahnya menjadi 16 satuan kerja setingkat Deputy Komisioner. Perubahan organisasi ini juga bagian dari komitmen OJK untuk menjadi otoritas yang kredibel dan relevan bagi masyarakat dan industri jasa keuangan serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

Selain perampingan organisasi, OJK juga sudah menerapkan pengurangan fasilitas dinas Dewan Komisioner OJK seperti perjalanan dinas dalam negeri dengan jarak tempuh kurang dari dua jam menggunakan kelas ekonomi. Sementara untuk perjalanan dinas luar negeri menggunakan kelas bisnis dan hanya untuk kegiatan yang berdampak kepada pengawasan industri keuangan dan perekonomian Indonesia. Upaya efisiensi juga dilakukan antara lain mengevaluasi tata persuratan yang akan memanfaatkan teknologi digital sehingga mengurangi penggunaan kertas (paperless), rekrutmen pegawai baru hanya untuk hal yang bersifat mendesak, dan mengurangi seremonial yang tidak penting.

Program efisiensi dan efektivitas organisasi merupakan keputusan yang diambil pada Rapat Dewan Komisioner OJK pertama setelah Dewan Komisioner OJK diambil sumpahnya di Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2017.

Adapun perubahan jabatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Imansyah menjadi Deputy Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Integrasi
2. Hendrikus Ivo menjadi Deputy Komisioner Penyidikan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Ety Retno Wulandari menjadi Deputy Komisioner Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan
4. Slamet Edy Purnomo menjadi Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV
5. Sukarela Batunanggar menjadi Deputy Komisioner OJK Institute
6. Budie Armanto menjadi Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I
7. Hernawan Bakti Sasongko menjadi Advisor Senior pada Strategic Committee dan Pusat Riset
8. Adie Soesetyantoro menjadi Advisor Senior pada Strategic Committee dan Pusat Riset
9. Agus Edy Siregar menjadi Advisor Senior pada Strategic Committee dan Pusat Riset
10. Anto Prabowo menjadi Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner, Hubungan Masyarakat dan Internasional dan Plt. Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik
11. Kristianti Puji menjadi Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan
12. Rudi Saleh Susetyo menjadi Kepala Departemen Perlindungan Konsumen
13. Nahor Hutahuruk menjadi Kepala Departemen Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Terintegrasi

14. I. B. Aditya Jayaantara menjadi Setingkat Kepala Departemen Grup Penelitian, Pengaturan dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
15. Saut Simanjuntak menjadi Advisor pada Strategic Committee dan Pusat Riset
16. Zulkarnain Sitompul menjadi Advisor pada Strategic Committee dan Pusat Riset
17. Widyo Gunadi menjadi Advisor pada Strategic Committee dan Pusat Riset
18. Retno Ici menjadi Advisor pada Strategic Committee dan Pusat Riset
19. Yetti Septirawati menjadi Advisor pada Strategic Committee dan Pusat Riset
20. Arif Zainuddin menjadi Kepala Grup Setingkat Kepala Departemen Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro,
21. Triyono menjadi Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro,

(Sumber: Infobank, 1 Agustus 2017)

KINERJA PERBANKAN

Kredit Bank Hanya Tumbuh 7,6%

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan pada bulan Juni 2017 mengalami perlambatan. Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp4.518,1 triliun atau hanya tumbuh 7,6 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 8,6 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan terjadi pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). KMK tercatat sebesar Rp2.097,8 triliun atau tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy).

Pertumbuhan KMK yang melambat ini terutama disebabkan oleh kredit yang disalurkan kepada sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor keuangan, real estate & jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh melambat dari 6,7 persen (yoy) dan 18,5 persen (yoy) menjadi masing-masing sebesar 4,3 persen (yoy) dan 17,1 persen (yoy). Di sisi lain, KI juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 7,9 persen (yoy) pada Mei 2017 menjadi 6,1 persen pada Juni 2017 (yoy). Adapun perlambatan pertumbuhan KI tersebut terutama terjadi pada sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel & restoran yang masing-masing tumbuh melambat dari 4,7 persen (yoy) dan 8,2 persen (yoy) menjadi 3,5 persen (yoy) dan 6,7 persen (yoy) pada Juni 2017. Namun demikian, Kredit Konsumsi (KK) mengalami peningkatan pertumbuhan. Pada akhir Juni 2017, KK tercatat sebesar Rp1.306,2 triliun atau mengalami

pertumbuhan sebesar 9,9 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 9,5 persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan KK tersebut terjadi sejalan dengan periode Idul Fitri 2017.

Sementara itu, sektor properti juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada Juni 2017. Adapun posisi kredit properti tercatat sebesar Rp746,8 triliun atau tumbuh 12,1 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 13,7 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut bersumber dari kredit yang disalurkan kepada sektor konstruksi dan real estate, meskipun tertahan oleh peningkatan pertumbuhan KPR dan KPA. Kredit konstruksi tercatat tumbuh melambat dari 24,1 persen (yoy) menjadi 20,8 persen (yoy) pada Juni 2017. Demikian juga pertumbuhan kredit real estate melambat menjadi sebesar 10,4 persen (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,9 persen (yoy). Kondisi sebaliknya terjadi pada KPR dan KPA yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan dari 7,7 persen (yoy) menjadi 7,9 persen (yoy) pada Juni 2017.

Sementara itu, untuk suku bunga kredit mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya suku bunga simpanan berjangka. Pada Juni 2017, rata-rata suku bunga kredit tercatat 11,77 persen, turun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 11,83 persen. Sedangkan untuk suku bunga simpanan dengan tenor 1, 6, 12 dan 24 bulan juga turun menjadi masing-masing 6,30 persen, 6,95 persen, 7,05 persen dan 6,95 persen, dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 6,37 persen, 7,03 persen, 7,11% dan 6,97 persen

(Sumber: Infobank, 1 Agustus 2017)

Kredit Melambat, BI Masih Yakin Tumbuh Double Digit

Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan kredit perbankan akan mengalami perbaikan di Semester II tahun ini dan diyakini dapat tembus 10 persen atau tumbuh double digit hingga akhir tahun. Kendati per Juni 2017, kredit perbankan hanya mampu tumbuh di 7,6 persen. Memasuki Semester dua tahun ini semua sektor akan mulai bergerak, sehingga diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit sampai dengan akhir Juli 2017, memang masih belum menggembirakan. Namun, dengan adanya penyerapan anggaran

pemerintah yang sudah dimulai dan proyek-proyek infrastruktur yang berjalan, tentu akan menopang pertumbuhan kredit.

BI mencatat, penyaluran kredit perbankan pada Juni 2017 mengalami perlambatan yakni hanya tumbuh 7,6 persen secara setahunan (yoy) atau sebesar Rp4.518,1 triliun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu tumbuh pada angka 8,6 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan terjadi pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). KMK tercatat sebesar Rp2.097,8 triliun atau tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy). Pertumbuhan KMK yang melambat ini terutama disebabkan oleh kredit yang disalurkan kepada sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor keuangan, real estate & jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh melambat dari 6,7 persen (yoy) dan 18,5 persen (yoy) menjadi masing-masing sebesar 4,3 persen (yoy) dan 17,1 persen (yoy). Di sisi lain, KI juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 7,9 persen (yoy) pada Mei 2017 menjadi 6,1 persen pada Juni 2017 (yoy). Adapun perlambatan pertumbuhan KI tersebut terutama terjadi pada sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel & restoran yang masing-masing tumbuh melambat dari 4,7 persen (yoy) dan 8,2 persen (yoy) menjadi 3,5 persen (yoy) dan 6,7 persen (yoy) pada Juni 2017

(Sumber: Infobank, 4 Agustus 2017)

PERBANKAN SYARIAH

Rencana Bisnis: Bank Syariah Mulai Migrasi Kartu

Bukan hanya bank konvensional yang bermigrasi ke kartu debit *chip*, perbankan syariah pun mulai melakukan langkah serupa meskipun diberikan waktu 5 tahun ke depan. Bank Indonesia sudah membuat perencanaan terkait dengan proses implementasi penggunaan DKSP tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 Digit untuk Kartu ATM/Debit yang Diterbitkan di Indonesia, BI memperpanjang waktu implementasi dari 31 Desember 2015 menjadi 31 Desember 2021.

Tahapan yang diatur dalam SEBI tersebut antara lain implementasi *host* dan *back end system* paling lambat 30 Juni 2017. Pengadaan terminal ATM dan EDC mulai 1 Juli 2017. Untuk penerbitan kartu ATM /debit dihitung dengan tahapan pada 1 Januari 2019 sebanyak 30% dari kartu sudah harus menggunakan *chip*, sebanyak 50% pada 1 Januari 2020, sebanyak 80% pada Januari 2021, dan 100% pada Januari 2022.

(Sumber: Bisnis Indonesia, 31 Juli 2017,hal.23)

SDM Jadi Salah Satu Permasalahan di Perbankan Syariah

Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekaligus Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Halim Alamsyah mengatakan pertumbuhan industri keuangan syariah sangat cepat, namun diakui hal tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Lembaga pendidikan perbankan seperti IBI, LPPI dan Universitas-universitas juga terus melakukan pembinaan, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi pembinaan untuk bankir yang menduduki level atas, selain waktu dibutuhkan juga biaya yang tidak sedikit. Sehingga ke depannya diperlukan aturan dan juga pendidikan yang intensif agar dapat tercipta SDM yang mumpuni di industri perbankan syariah.

Seperti diketahui, pertumbuhan pasar di industri perbankan syariah sejak satu tahun kebelakang mulai menunjukkan geliatnya. Setelah Bank Pembangunan Daerah Aceh mengkonversi bisnisnya menjadi Bank Syariah, pangsa pasar perbankan syariah nasional berhasil menembus angka 5%. Meskipun begitu, pertumbuhan perbankan syariah nasional masih kalah jauh jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang pada tahun lalu pangsa pasarnya mencapai 50% dari total aset perbankan.

(Sumber: Infobank, 1 Agustus 2017)
